

Determinasi sosial ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur: Analisis data panel menggunakan fixed effect model

Sinta Oktavia*, Reva Ghani Febriani, Muhammad Abdul Hadi, Anindya Zulfa Asykurunnizza, Rintan Della Adyistia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: sintaokta258@gmail.com)

Abstract

Poverty is one of the main challenges facing East Java, as it is the most densely populated region in Indonesia. This study aims to investigate the impact of social and economic variables, including life expectancy, population size, gross domestic product per capita, human development index, labour force participation rate, and minimum wage, on the poverty rate in East Java Province from 2021 to 2023. This research employs a quantitative method to collect panel data from 38 districts/cities, analysed using a panel data regression model with the Fixed Effects Model (FEM). The results indicate that Life Expectancy, Population Size, and GDP per capita have a negative and significant impact on poverty, meaning that increases in these three variables can reduce poverty levels. Meanwhile, the Human Development Index, Labour Force Participation Rate, and Minimum Wage have a positive but insignificant impact, suggesting that these factors are not yet effective in reducing poverty. These findings indicate that health development policies, management of the productive-age population, and inclusive economic growth have a greater impact on poverty alleviation than increases in the minimum wage or HDI. The government should focus on data-driven interventions, such as health programs and workforce training, and ensure the equitable distribution of development benefits.

Keywords: Poverty Rate, Life Expectancy, Gross Regional Domestic Product Per Capita, Human Development Index, Minimum Wage.

Abstrak

Kemiskinan adalah salah satu tantangan utama Jawa Timur sebagai wilayah terpadat di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui cara bagaimana variabel sosial dan ekonomi, yaitu angka harapan hidup, jumlah penduduk, prduk domestik bruto perkapita, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkata kerja, Upah Minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2021-2023. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif untuk mengupulkan data panel dari 38 kabupaten/kota, dianalisis melalui regresi data panel model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan Angka Harapan Hidup, Jumlah Penduduk, dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan ketiga variabel tersebut dapat menurunkan di tingkat kemiskinan. Dengan ini, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkata Kerja, dan Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan, menunjukkan bahwa faktor-faktor ini belum efektif dalam mengurangi kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan kesehatan, pengelolaan penduduk usia produktif, dan pertumbuhan ekonomi inklusif lebih berdampak pada pengentasan kemiskinan dibandingkan peningkatan upah minimum atau IPM. Pemerintah perlu fokus pada intervensi berbasis data, seperti program kesehatan dan pelatihan tenaga kerja, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan.

Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum.

How to cite: Oktavia, S., Febriani, R. G., Hadi, M. A., Asykurunnizza, A. Z., & Adyistia, R. D. (2025). Determinasi sosial ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur: Analisis data panel menggunakan fixed effect model. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 459–476. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i2.1937>



1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi, termasuk masalah angka kemiskinan yang terus meningkat. Menurut Aisyah et al. (2013), kemiskinan adalah tantangan yang ditemui oleh berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia terdiri dari 38 provinsi salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur yang menjadi provinsi terbesar di Pulau Jawa dan terpadat kedua di Indonesia ini juga menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berhubungan erat dengan kualitas hidup manusia, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan pendapatan (Herlambang & Rachmawati, 2023). Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi dengan standar rendah. Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan juga menunjukkan batas-batas kekuatan sumber yang diperlukan untuk meningkatkan komunitas (El Adawiyah et al., 2021). Tingkat kemiskinan juga merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Di Provinsi Jawa Timur, angka kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah, mengingat masih tingginya jumlah penduduk miskin di beberapa wilayah, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengentasan.

Dan ada perbedaan mendasar khususnya pandangan kemiskinan dan solusi yang kami berikan untuk mengatasi masalah ini. Dalam kesehatan masyarakat dapat dinilai melalui beberapa indikator, salah satu contohnya ialah (AHH). Angka Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata umur yang diperkirakan atas dasar kematian seseorang di suatu wilayah. Angka Harapan Hidup merupakan indikator untuk mengevaluasi efektivitas kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup maka tingkat kesehatan di suatu wilayah akan semakin meningkat. Namun, jika Angka Harapan Hidup rendah, maka pemerintah harus membuat banyak program kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun yang diperkirakan akan dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa tingkat kematian saat ini (pada setiap kelompok umur) tetap tidak berubah sepanjang hidupnya (Maryani & Kristiana, 2018). AHH biasanya dihitung terpisah antara laki-laki dan perempuan, karena terdapat perbedaan pola kematian dan faktor biologis maupun sosial yang memengaruhi usia harapan hidup. Rendahnya Angka Harapan Hidup di suatu kabupaten/kota harus ditingkatkan dengan diadakan program pembangunan kesehatan. Dalam upaya pembangunan ekonomi, perlu diberikan perhatian pada implementasi pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah suatu proses transformasi tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang memadai menuju standar kesehatan yang lebih baik.

Pembangunan kesehatan dianggap penting karena dianggap sebagai investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila kesehatan masyarakat baik maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan pendapatan akan

meningkat pula. Menurut BPS (2021), angkatan kerja merupakan jumlah penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan sebagai indikator untuk melihat fluktuasi jumlah penduduk yang berusia kerja dalam kegiatan ekonomi (Mumekh, 2023). TPAK adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan total jumlah penduduk usia kerja (Murialti & Romanda, 2020). Jumlah Penduduk adalah total atau keseluruhan banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah atau negara pada waktu tertentu. Data jumlah penduduk biasanya diperoleh melalui sensus, registrasi penduduk, atau survei demografi, dan digunakan untuk perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, serta analisis sosial dan ekonomi (Ramdhani & Jazuli, 2025). Faktor lain yang menyebabkan masalah kemiskinan yaitu buruknya kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan juga rendahnya kualitas dari sumber daya manusia. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat angka IPM suatu daerah. Jika angka IPM di daerah tersebut rendah, maka produktivitas masyarakatnya juga rendah (Q'rene et al., 2023). Menurut Herdiansyah & Kurniati (2020), IPM adalah ukuran yang digunakan untuk menilai hasil pembangunan manusia berdasarkan berbagai komponen mendasar dari kualitas hidup.

IPM didasarkan pada tiga dimensi utama yang mencakup kualitas hidup, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Kesehatan diukur melalui AHH saat lahir, sementara dimensi pengetahuan diukur menggunakan kombinasi angka dan rata-rata lama bersekolah. Untuk menilai taraf hidup, digunakan indikator daya beli terhadap kebutuhan dasar, yang dilihat dari pengeluaran individu sebagai perwakilan dari pendapatan untuk mencapai kehidupan yang layak (Widodo & Zakiah, 2022). Menurut Juniarsih (2021), Produk Domestik Regional Bruto Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh barang dan jasa, atau nilai akhir dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai unit usaha di suatu wilayah. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan PDRB, tanpa mempertimbangkan apakah kenaikan tersebut signifikan atau tidak. Pengukuran laju pertumbuhan ini tidak hanya berdasarkan total PDRB, tetapi juga memperhatikan seberapa baik distribusi pendapatan di masyarakat. Tinggi rendahnya angka PDRB di suatu daerah dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada (Laksamana, 2016). Menurut Pakpahan & Lubis (2020), definisi upah adalah sebagai pembayaran yang diperoleh dari berbagai macam bentuk jasa yang tersedia yang diberikan oleh para tenaga kerja kepada para pengusaha yang secara spesifik membutuhkan untuk memenuhi faktor produksi perusahaannya

Sedangkan Upah Minimum adalah upah yang menjadi suatu standar minimum pemberian upah yang digunakan oleh para pelaku usaha, pemilik modal, Pelaku industri, yang memberikan upah atau gaji yang berada dalam lingkup perusahaannya atau lingkungan kerjanya. Tujuan dari penetapan upah minimum kabupaten atau kota agar supaya para pekerja ini dapat memperoleh penghasilan yang layak sebagai balas jasa atas tenaga yang diberikan oleh tenaga kerja kepada pihak perusahaannya yang menggunakan jasanya (Abduh, 2022). Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji

tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan (seperti AHH, Jumlah Penduduk, PDRB per kapita, IPM, TPAK, dan Upah Minimum) terhadap tingkat kemiskinan. Dalam hal ini menyatakan bahwa Secara konsisten, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan pengaruh negatif signifikan di sebagian besar penelitian. Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan beragam, dengan beberapa penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan, sementara yang lain menunjukkan pengaruh positif. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan metodologi, periode penelitian, atau faktor kontekstual lainnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya membahas tentang berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, dengan kemiskinan sebagai salah satu isu utama.

Pada bagian ini, dibahas sejumlah faktor yang dianggap memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti angka harapan hidup, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum. Pembahasan ini bersifat nasional dan konseptual, tidak terbatas pada wilayah tertentu, serta mencerminkan kondisi yang relevan dalam konteks waktu terkini hingga tahun 2023. Tujuan dari bagian ini adalah memberikan gambaran awal mengenai kompleksitas permasalahan kemiskinan di Indonesia dari berbagai aspek ekonomi dan sosial. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang luas dan umum, fokus utama makalah ini adalah menganalisis secara spesifik pengaruh jumlah penduduk, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan kuantitatif untuk melihat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kemiskinan secara lebih terarah pada wilayah dan rentang waktu tertentu. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian yang lebih terfokus, berdasarkan data konkret yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pengaruh variabel-variabel sosial dan ekonomi seperti Angka Harapan Hidup, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021–2023.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengukur kontribusi relatif masing-masing variabel terhadap kemiskinan pada tingkat kabupaten/kota serta mengidentifikasi perubahan pengaruhnya selama masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi interaksi antar variabel misalnya sinergi antara IPM dan PDRB dalam menurunkan kemiskinan yang belum banyak diungkap dalam studi sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan data panel dan analisis spasial, penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi pola distribusi wilayah miskin serta klaster kemiskinan di Jawa Timur, sehingga dapat

memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis bukti sesuai karakteristik daerah masing-masing.

2. Tinjauan Pustaka

Kemiskinan: Konsep, Dimensi, dan Faktor yang Mempengaruhi

Kemiskinan adalah salah satu tantangan terbesar bagi negara - negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalahnya adalah bahwa tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki dampak komprehensif pada banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, dan pendapatan. Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan mencerminkan keterbatasan manajemen dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan lubang di masyarakat (Telaumbanua & Ndraha, 2023). Oleh karena itu, kemiskinan sering dijadikan tolak ukur penting dalam menilai sejauh mana pembangunan sosial dan ekonomi di suatu daerah telah berhasil. Teori utama yang diangkat dalam artikel ini menyoroti bahwa kemiskinan bukanlah masalah tunggal yang hanya berkaitan dengan kekurangan materi, melainkan sebuah fenomena yang kompleks dan multidimensi. Kemiskinan tidak sekadar berarti ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari nya, tetapi juga erat kaitannya dengan kualitas hidup secara menyeluruh, yang dimulai dari akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, hingga kesempatan kerja dan tingkat pendapatan.

Dari perspektif ekonomi, kemiskinan mencerminkan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendorong kesejahteraan masyarakat (Meytriana et al., 2025). Karena itu, kemiskinan menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Artikel ini menekankan pentingnya sejumlah faktor yang secara teori dan bukti empiris dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Beberapa dari mereka adalah angka harapan hidup (AHH), jumlah penduduk, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), TPAK, dan upah minimum. Angka Harapan Hidup mencerminkan keberhasilan sektor kesehatan dan kualitas kehidupan publik. PDRB per kapita menunjukkan kapasitas ekonomi kawasan dalam produksi nilai tambah dan pendapatan. IPM digunakan untuk mengukur hidup dengan tiga aspek penting dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Sementara itu, upah minimum dipandang sebagai alat kebijakan untuk menjamin penghasilan layak bagi para pekerja (Junaedi, 2018). Selain itu, artikel ini didasarkan pada gagasan bahwa meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengelola populasi usia yang dipekerjakan, ekuitas dan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi memiliki dampak besar pada pengurangan kemiskinan. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dari pada mengandalkan kenaikan upah minimum atau peningkatan IPM semata.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif, lalu hasilnya ditunjukkan bentuk angka yang diperiksa dengan alat statistik. Jumlah informasi yang digunakan data sekunder dikumpulkan dalam bentuk data numerik dan dievaluasi secara statistik, yang berasal

dari sumber resmi yang sebelumnya tersedia. Sumber data utama analisis iBadan Pusat Statistik (BPS), yang mencakup informasi mengenai Angka Harapan Hidup (AHH), Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2021 hingga 2023. Populasi penelitian ini mencakup semua kabupaten/kota, dari 29 kabupaten dan 9 kota, sehingga total 38 wilayah. Dengan 114 observasi yang dilakukan panel selama tiga tahun.

Regresi data panel digunakan untuk mencangkup data *cross section* dan *time series*. *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) adalah tiga contoh yang digunakan, dan uji Chow, Hausman, dan *Lagrange Multiplier* (LM) menentukan mana yang terbaik. Setelah menentukan model terbaik, melakukan pengujian asumsi klasik serta uji kelayakan model (*goodness of fit*) melalui analisis koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Adapun model penelitian sebagai berikut

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 AHH_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \beta_5 TPAK_{it} + \beta_6 UP_{it} + e$$

Y merepresentasikan tingkat kemiskinan, AHH adalah angka harapan hidup, JP jumlah penduduk, PDRB produk domestik regional bruto per kapita, IPM indeks pembangunan manusia, TPAK tingkat partisipasi angkatan kerja, dan UP upah minimum. Nilai α menunjukkan konstanta, β koefisien masing-masing variabel, i unit atau kabupaten koata, t adalah periode waktu penelitian yang mencakup tahun 2021–2023, sedangkan e merupakan error

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Pemilihan Model

Pemilihan model diawali dengan Uji Chow untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Uji ini menggunakan nilai Chi-Square atau F-test dengan membandingkan p-value terhadap tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Jika p-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah FEM. Sebaliknya, jika p-value $> \alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah CEM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh p-value $< 0,05$, sehingga dipilih FEM sebagai model yang lebih sesuai. Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 1, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects	Test Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	141,376660	(37,70)	0,0000
Cross-section Chi-square	493,294362	37	0,0000

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Keputusan diambil dengan

membandingkan nilai probabilitas (p-value) pada Cross Section Random terhadap tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Jika p-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah FEM. Sebaliknya, jika p-value $> \alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 tidak diterima, sehingga model yang digunakan adalah REM. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 2, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model yang paling tepat menurut Uji Hausman adalah FEM.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-sq. d.f	Prob.
Cross-section random	82,315552	6	0,0000

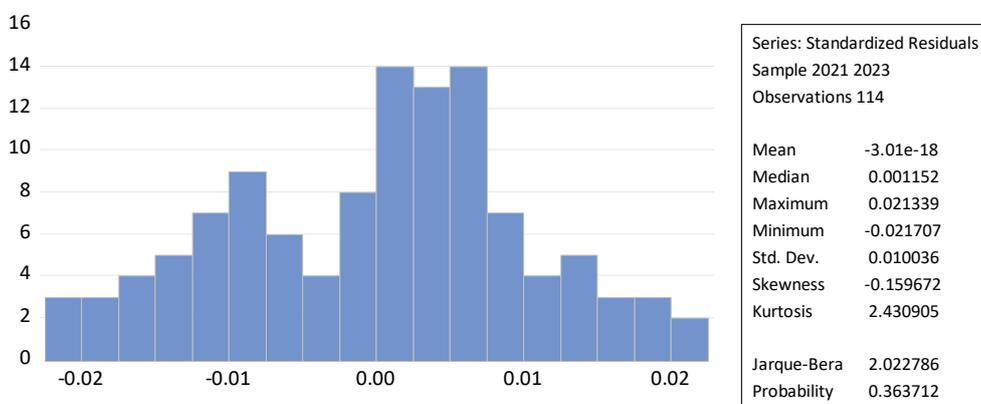
Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Uji ini dikembangkan oleh Breusch–Pagan, dengan dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas (p-value) dibandingkan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Jika p-value $> \alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang dipilih adalah CEM. Sebaliknya, jika p-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang digunakan adalah REM. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3, diperoleh nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, model yang sesuai berdasarkan Uji LM adalah REM.

Tabel 3. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	91,15364 (0,0000)	0,155514 (0,6999)	91,30916 (0,0000)

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik menggunakan pendekatan biasa dari banyak tes statistik yang melakukan regresi linier dan linier berganda sederhana, terutama untuk kotak terkecil *Ordinary Least Square* (OLS), sebelum analisis regresi linier dilakukan. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menjamin bahwa model regresi digunakan memenuhi persyaratan khusus dan hasil yang diharapkan dapat diandalkan. Jika semua asumsi klasik benar, model regresi linear dianggap searah dengan kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Uji pertama yaitu uji Normalitas, menentukan variabel terikat dan tidak terbatas memiliki distribusi normal. Nilai statistik probabilitas *Jarque-bera* (JB) menunjukkan distribusi normal jika nilai kurang dari nilai *Chi-Square* atau *p-value* $> 0,05$. Sedangkan, jika lebih besar dari nilai *Chi-Square* atau *p-value* $< 0,05$, data tersebut tidak normal. Berdasarkan hasil pada Gambar 1, didapatkan nilai probabilitas $0,363712 > 0,05$ yang artinya data yang digunakan berdistribusi normal.

Selanjutnya uji Multikolinearitas, untuk membuktikan tidak adanya hubungan yang signifikan melalui berbagai variabel dengan memperhatikan *Variance Inflation Factor* (VIF). jumlah VIF kurang dari 10 tidak adanya gejala multikolineritas, tetapi jika jumlah VIF lebih dari 10, bahwa multikolinearitas antar variabel bebas terlihat.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
AHH	0,009827	24819,28	2,405365
JP	5,45E-07	375433,7	3,384820
PDRB	6,06E-08	2321,985	2,992485
IPM	0,189776	461433,0	2,645445
TPAK	0,012931	31197,29	1,500371
UP	1,34E-08	23539,84	1,269404

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan variabel bebas sama sekali tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. Hasil proses hitung *Variance Inflation Factor* (VIF) bahwa variabel independen tidak lebih dari sepuluh. Bisa dilihat variabel Angka Harapan Hidup sebesar ($2,405 < 10$), Jumlah Penduduk sebesar ($3,384 < 10$), PDRB Per Kapita sebesar ($2,992 < 10$), IPM sebesar ($2,645 < 10$), TPAK sebesar ($1,500 < 10$), dan Upah Minimum sebesar ($1,269 < 10$). Kesimpulannya model regresi adalah bahwa variabel independent tidak menunjukkan tanda multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
AHH	0,054217	0,042255	1,283073	0,2073
JP	-0,000168	0,000315	-0,532721	0,5959
PDRB	9,77E-05	0,000105	0,930707	0,3552
IPM	-0,241295	0,185690	-1,299446	0,1981
TPAK	-0,005805	0,048471	-0,119759	0,9050
UP	-4,86E-05	4,93E-05	-0,985695	0,3277

Uji lainnya yaitu heteroskedastisitas, untuk menjamin varians residual antara pengamatan dalam regresi sama atau tidak. Ketika varians residual antara dua pengamatan tetap konsisten atau tetap, uji ini disebut homoskedastisitas. Ketika varians residu dari satu peristiwa ke peristiwa lain berbeda, disebut heteroskedastisitas. Hasil kedua ini mengindikasikan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi tersebut berkualitas baik. Jika variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya jika variable independent tidak memiliki dampak yang signifikan (dengan $\text{sig} > 0,05$), maka model dianggap tidak memiliki heteroskedastisitas. Berdasarkan Tabel 5, probabilitas dari variabel independen memiliki nilai Sig. $> 0,05$ (alpha), yaitu AHH ($0,2037 > 0,05$), JP

(0,5959 > 0,05), PDRB Per Kapita (0,3552 > 0,05), IPM (0,1981 > 0,05), TPAK (0,9050 > 0,05), dan UP (0,3277 > 0,05), disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Terakhir uji autokorelasi yang dilakukan dengan tujuannya menentukan hubungan antara variabel gangguan pada waktu t dan waktu sebelumnya ($t-1$). Studi ini menguji autokorelasi dengan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* atau uji *Lagrange Multiplier* (LM). Berdasarkan hasil dari analisis pada Tabel 6, disimpulkan tidak ada autokorelasi karena probabilitas *chi-square* uji LM adalah 0,1394, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1,879075	Prob. F (2,104)	0,1579
Obs*R-squared	3,940965	Prob. Chi-Square (2)	0,1394

Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Berdasarkan hasil serangkaian pengujian model, termasuk Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, diperoleh kesimpulan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah menyajikan hasil estimasi FEM guna menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 7. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	2,642650	0,843773	3,131943	0,0025
AHH	-0,310147	0,099132	-3,128622	0,0026
JP	-0,002144	0,000738	-2,904096	0,0049
PDRB	-0,001080	0,000246	-4,385808	0,0000
IPM	0,520186	0,435633	1,194092	0,2365
TPAK	0,063275	0,113715	0,556434	0,5797
UP	0,000143	0,00011	1,237850	0,2199
R-squared	0,997985			
Adjusted R-squared	0,995294			
F-statistic	556,7958			
Prob.	0,0000			

Koefisien Determinasi dan Uji F

Berdasarkan Tabel 7 nilai Adjusted R Square yang mencapai 0,995294, bahwa terkait variabel independen dan variabel dependen adalah 99% sementara 1% bagian lain dipengaruhi oleh elemen tambahan yang belum dibahas dalam pemeriksaan ini. Sementara nilai F hitung sebesar 556,7958 > dengan nilai F-tabel sebesar 2,2984 dan jumlah probabilitas F adalah $0,000 < 0,05$ disimpulkan tingkat kemiskinan dipengaruhi signifikan oleh semua variabel independen, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum.

Uji Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat tiga variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, yaitu Angka Harapan Hidup, Jumlah Penduduk, dan PDRB per kapita. Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai t -hitung $-3,1286 > t$ -tabel $1,9823$ dan signifikansi $0,0026 < 0,05$. Jumlah Penduduk juga berpengaruh negatif dan signifikan dengan t -hitung $-2,9040 > 1,9823$ dan signifikansi $0,0049 < 0,05$. PDRB per kapita menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan dengan t -hitung $-4,3858 > 1,9823$ dan signifikansi $0,0000 < 0,05$. Sementara itu, tiga variabel lainnya yaitu IPM, TPAK, dan Upah Minimum tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. IPM memiliki t -hitung $1,1940 < 1,9823$ dengan signifikansi $0,2365 > 0,05$; TPAK memiliki t -hitung $0,5564 < 1,9823$ dengan signifikansi $0,5797 > 0,05$; dan Upah Minimum memiliki t -hitung $1,2378 < 1,9823$ dengan signifikansi $0,2199 > 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait kesehatan, jumlah penduduk, dan kapasitas ekonomi daerah memiliki peranan penting dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan indikator pembangunan manusia, partisipasi tenaga kerja, dan kebijakan upah minimum belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam konteks penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Angka Harapan Hidup (AHH) dan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji data dan pemeriksaan hipotesis dilakukan dalam penelitian, pengujian variable uji t (parsial) menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Bahwa lebih banyak angka harapan hidup di suatu wilayah, maka tingkat kemiskinan menurun. Pengaruh negatif ini dapat dijelaskan melalui keterkaitan Angka Harapan Hidup dengan kualitas hidup masyarakat, seperti akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang memadai, dan lingkungan yang sehat. Angka harapan hidup yang tinggi umumnya mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan sosial, yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan Masyarakat dan Tingkat produktivitas. Dengan demikian, peningkatan Angka Harapan Hidup menjadi indikator penting dalam upaya pengentasan kemiskinan karena menunjukkan bahwa masyarakat hidup lebih lama dengan Kesehatan yang lebih baik dan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, khususnya dalam sektor kesehatan, dapat menjadi strategi efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Ini sependapat teori lingkaran kemiskinan yang dinyatakan oleh Nurkse (Andrianik, 2015) aksesibilitas adalah faktor yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan. Akibat dari kurangnya akses dan keterbatasan yang ada, manusia sering kali terjebak dalam berbagai pilihan minim (bahkan tidak ada sama sekali) untuk meningkatkan kehidupan mereka, jadi jika mereka tidak menjalani apa yang seharusnya mereka jalani saat ini, bukan apa yang seharusnya mereka Jalani. Dalam keadaan seperti ini, orang terpaksa menjalani kehidupan yang miskin.

Penelitian ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Christy et al. (2024) ditemukan bahwa AHH dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Bahwa dalam studi kesehatan potensinya berkurang ditingkat kemiskinan. Kesehatan baik berkaitan dengan produktivitas, di mana peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan dalam jangka panjang mendorong tingkat produktivitas masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Ini karena lebih tinggi angka harapan hidup di suatu wilayah, lebih rendah tingkat kemiskinannya. Hal ini dapat dijelaskan melalui peran kualitas Kesehatan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses yang mudah ke layanan kesehatan, makanan yang baik, dan lingkungan yang sehat, mereka cenderung hidup lebih lama dan menghasilkan lebih banyak uang. Produktivitas yang tinggi ini pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan, sehingga mengurangi kemungkinan terjebak dalam kemiskinan. Dan penelitian ini searah dengan Duarsa & Wijaya (2023) ditemukan bahwa AHH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di tujuh kabupaten. Bahwa peningkatan AHH berhubungan dengan mengurangi angka kemiskinan. Ini dapat dijelaskan melalui peran kualitas kesehatan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena ketika Masyarakat memiliki layanan Kesehatan yang baik, makanan yang sehat, dan lingkungan sehat mereka cenderung hidup lebih lama dan menghasilkan lebih banyak uang. Produktivitas yang tinggi ini pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan, sehingga mengurangi kemungkinan terjebak dalam kemiskinan.

Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil uji data dan pemeriksaan hipotesis dilakukan dalam penelitian, pengujian variable uji t (parsial) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Alasannya jika total warga bertambah, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berkurang. Karena sebagian besar warga yang tinggal Jawa Timur orangnya yang berusia kerja (produktif). Hasil ini sependapat dengan teori sumber daya manusia (*human capital theory*) oleh Syofya (2018) menyatakan sejumlah aspek yang menjadikan penduduk sebagai pendorong pertumbuhan dan memiliki dampak negatif pada tingkat kemiskinan. Karena populasi yang besar menciptakan pasar yang dapat menyebabkan permintaan, penduduk dianggap sebagai pendorong pembangunan untuk barang dan layanan. Ini memiliki kemampuan untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi, menghasilkan skala ekonomi menguntungkan disemua pihak, menurunkan biaya dan menyediakan jumlah tenaga kerja yang cukup dan yang memadai dengan harga terjangkau. Selain itu, program seperti Keluarga Berencana (KB) dan penguatan sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur telah mengoptimalkan peran penduduk sebagai aset pembangunan, sehingga pertumbuhan penduduk tidak lagi identik dengan beban ekonomi, melainkan peluang untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja menjadi kunci dalam mempertahankan tren positif ini.

Penelitian ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Ristika et al. (2021) ditunjukkan jumlah penduduk memiliki dampak negatif besar pada tingkat kemiskinan. Antara kelompok negatif dan kemiskinan berarti bahwa peningkatan populasi wilayah mengurangi tingkat kemiskinan. Fakta bahwa tingkat kesuburan jumlah penduduk di Jawa Timur lebih tinggi dari tingkat kematian yang relatif rendah juga mendukung penelitian. Dan penelitian ini searah dengan Abdullah & Astuti (2023) Jumlah Penduduk telah ditemukan memiliki dampak negatif besar pada kemiskinan di Jawa Timur. Karena didukung oleh data BPS yang menunjukkan bahwa di Jawa Timur mempunyai tingkat kelahiran yang meningkat dibandingkan tingkat kematian, sehingga jumlah penduduk terus bertambah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan yang lebih tinggi dari pada kematian. Namun, pertumbuhan populasi dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan pedoman yang tepat seperti meningkatkan kualitas bakat dan menciptakan lapangan kerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita dan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji data dan pemeriksaan hipotesis dilakukan dalam penelitian, pengujian variable uji t (parsial) menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta pertumbuhan ekonomi yang dilakukan PDRB Per Kapita tidak diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata, sehingga masyarakat miskin tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Selain itu, struktur ekonomi Jawa Timur didominasi oleh sektor-sektor padat modal atau industri besar yang kurang menyerap tenaga kerja dari kelompok berpenghasilan rendah. Faktor lain seperti tingginya inflasi, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta minimnya program sosial yang tepat sasaran juga dapat memperlemah dampak PDRB Per Kapita dalam tingkat kemiskinan sosial. Meskipun PDRB Per Kapita meningkat, kemiskinan tidak serta-merta berkurang jika pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Temuan ini sependapat dengan teori pertumbuhan ekonomi Solow (1956) yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan distribusi pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru (Priyono & Ismail, 2017). Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memungkinkan terjadinya pemerataan pendapatan melalui kebijakan redistribusi yang efektif, sehingga ketimpangan sosial dapat dikurangi. Dengan demikian, teori ini menekankan pembangunan ekonomi yang inklusif tidak hanya berfokus meningkatkan output nasional, tetapi pada bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan merata pada seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin.

Penelitian ini mengkonfirmasi temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahputri & Fisabilillah (2023) memiliki hasil sama. PDRB Per Kapita mampu menampilkan aktivitas perekonomian dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. PDRB Per Kapita diukur melalui penggunaan sumber daya yang dapat menyebabkan pekerjaan, meningkatkan produksi, meningkatkan pemasukan Masyarakat, dan meningkatkan tenaga kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi Tingkat kemiskinan di negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji data dan pemeriksaan hipotesis dilakukan dalam penelitian, pengujian variable uji t (parsial) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian menampilkan IPM karena ukuran gabungan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, peningkatannya tidak menunjukkan hubungan secara langsung dengan penurunan angka kemiskinan dalam konteks wilayah dan periode yang diteliti. Ketidaksignifikanan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketimpangan distribusi pembangunan antar daerah, ketidakseimbangan dalam pencapaian komponen-komponen IPM, atau adanya faktor lain di luar IPM yang lebih dominan memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti pengangguran, inflasi, atau ketidakmerataan akses ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM secara agregat belum tentu berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan tanpa diiringi pemerataan hasil pembangunan dan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlu diperhatikan tidak hanya peningkatan nilai IPM secara keseluruhan, tetapi juga efektivitas implementasi kebijakan pembangunan agar benar-benar menyentuh kelompok masyarakat miskin. Temuan ini sependapat dengan teori Human Capital pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Gary Becker (Yakup et al., 2025) yang mendefinisikan Human Capital sebagai “pencapaian pendidikan, pengalaman kerja, dan atribut personal lainnya yang mempengaruhi produktivitas kerja”. Selain itu, investasi meningkatkan produktivitas dalam Pendidikan dan Kesehatan, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Karena meskipun IPM meningkat (misalnya karena Pembangunan sekolah atau fasilitas Kesehatan), jika peningkatan kualitas tidak diiringi dengan akses kerja yang baik, maka hasilnya belum berdampak langsung ke pengurangan kemiskinan.

Penelitian ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Faadihilah & Primadha (2023) ditemukan bahwa IPM dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Namun upah minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Karena menunjukkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan pendapatan langsung (seperti upah minimum) yang memiliki hasil yang lebih baik mengurangi kemiskinan dari pada peningkatan IPM secara keseluruhan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji data dan pemeriksaan hipotesis dilakukan dalam penelitian, pengujian variable uji t (parsial) menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun lebih banyak penduduk yang berada di wilayah tertentu masuk dalam angkatan kerja, belum tentu mereka terserap dalam pekerjaan yang produktif atau layak, sehingga tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, faktor kualitas tenaga kerja, jenis pekerjaan, dan ketimpangan pendapatan juga dapat menjadi variabel antara yang memengaruhi hubungan antara TPAK dan Tingkat Kemiskinan. Temuan ini selaras dalam konsep nilai kerja yang dikemukakan

oleh Ricardo (Hasan et al, 2020) yang sangat dikenal adalah *Principles of Political Economy and Taxation* (Prinsip-Prinsip Ekonomi Politik dan Perpajakan) yang diterbitkan pada periode 1817. Ricardo menjelaskan pandangannya tentang teori nilai dari tenaga kerja. Membahas tentang upah dan tingkat keuntungan yang setara, serta menyatakan bahwa Modal dalam proses produksi hanya terdiri dari upah. Rentang waktu produksi adalah serupa untuk semua jenis barang.

Penelitian ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Mufida et al. (2021). Penyebabnya adalah penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur masih kurang optimal, kualitas SDM yang kurang sehingga upah yang diberikan rendah dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa dengan berkurangnya tenaga kerja yang terserap belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Upah Minimum (UP) dan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji data dan pemeriksaan hipotesis dilakukan dalam penelitian, pengujian variable uji t (parsial) menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ini memperlihatkan setiap meningkatnya upah minimum cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan, meskipun hubungan tersebut tidak cukup kuat atau meyakinkan untuk disimpulkan secara umum. Pengaruh positif ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu kemungkinan terjadinya pengurangan tenaga kerja akibat beban upah yang meningkat, terutama di sektor usaha kecil dan padat karya. Selain itu, kenaikan upah minimum dapat mendorong naiknya harga barang dan jasa (inflasi biaya), yang justru membebani kelompok masyarakat miskin yang tidak menikmati kenaikan pendapatan. Namun demikian, ketidaksignifikanan secara statistik mengindikasikan bahwa Upah Minimum bukanlah faktor dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan, dan pengaruhnya bisa jadi bervariasi antar daerah serta dipengaruhi oleh variabel lain seperti pendidikan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan sosial. Dengan demikian, kebijakan kenaikan upah minimum perlu diiringi dengan pendekatan multidimensi yang lebih komprehensif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Temuan ini sependapat dengan teori John Maynard Keynes (Priyono dan Ismail, 2017) tentang upah kaum klasik mengatakan bahwa upah yang kaku menyebabkan pengangguran tinggi karena disebabkan oleh kontrak kerja, upah minimum, dan serikat pekerja. Menurut Keynes, pengangguran disebabkan adanya upah nominal. Untuk mengurangi pengangguran, pengurangan upah nominal harus lebih besar dari Tingkat inflasi.

Penelitian ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya yang dilakukan oleh (Atunnisa et al., 2024) yang menyatakan upah minimum tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, Ketika upah minimum mengalami peningkatan jadi kemiskinan juga akan mengalami peningkatan karena upah minimum sangat meningkat menjadikan perusahaan tidak bisa membayar kompensasi, jadi Perusahaan tersebut mengurangi tenaga kerja, dan berkurangan tenaga kerja berarti membuat pekerja menganggur sehingga kehilangan penghasilan. Dan penelitian ini searah dengan (Riyandini, 2024)

menunjukkan IPM berdampak negatif signifikan dan TPT berdampak positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, upah minimum dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan. Bahwa peningkatan IPM cenderung menurunkan kemiskinan, sementara peningkatan TPT meningkatkan kemiskinan. Sedangkan upah minimum dan bantuan sosial, berdasarkan penelitian ini, tidak secara signifikan memengaruhi kemiskinan di Jawa Timur selama periode tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, penelitian ini mengungkapkan Angka Harapan Hidup (AHH), Jumlah Penduduk (JP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2023. Angka Harapan Hidup mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan yang mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan jumlah penduduk didukung oleh kebijakan penguatan ketenagakerjaan dan kualitas SDM malah justru menjadi aset pembangunan yang mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak signifikan berdampak kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup belum merata atau belum diikuti oleh akses ekonomi yang inklusif bagi kelompok rentan.

Temuan kritis lain adalah TPAK dan UM berpengaruh positif namun tidak signifikan, menegaskan bahwa perluasan lapangan kerja dan kenaikan upah belum otomatis menurunkan kemiskinan tanpa didukung peningkatan kualitas SDM, penyerapan tenaga kerja yang optimal, dan kebijakan pendampingan multidimensi. Penelitian ini menawarkan perspektif baru: Pertumbuhan penduduk dan ekonomi dapat menjadi solusi kemiskinan jika diimbangi pemerataan akses kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja layak, sementara kebijakan pengupahan atau bantuan sosial perlu lebih ditargetkan pada kelompok miskin untuk memutus lingkaran ketidaksetaraan.

Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendorong dan memotivasi untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.

Referensi

- Abduh, R. (2022). Perspektif Kesejahteraan Tenagakerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 38-44. <https://doi.org/10.55357/is.v3i1.211>
- Abdullah, H. & Astuti, I.P. (2023). Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Jawa Timur 2013-2022. *Jurnal Ekobistek*, 12(3), 687–692. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i3.628>
- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722-3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>

- Andrianik, N. A. (2015). Pengaruh Status Sosial, Ekonomi, dan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Kemiskinan di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. *Swara Bhumi*, 3(3).
- Atunnisa, T. M., Zabid, M., Salwa, A., & Bintang, M. (2024). Buletin Ekonomika Pembangunan Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata- Rata Lama Sekolah Dan Upah Minimum Terhadap Penduduk Miskin Di Jawa Timur Tahun 2023. *Buletin Ekonomika Pembangunan*. 5(2), 277–288. <https://doi.org/10.21107/bep.v5i2.26314>
- Christy, N., Asmara, K. A., & Bachtiar, A. (2024). Analisis Pengaruh Antara Pendidikan, Kesehatan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 678-688. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14431993>
- Duarsa, F. A., & Wijaya, R. S. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, RIs, Ahh, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Equilibria Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 117-124. <https://doi.org/10.26877/ep.v8i2.17306>
- El Adawiyah, S., Hermanto, A., Yasya, W., Kristanti, R., & Chrisye, M. (2021). Akses Terhadap Sumber Daya Alam Pada Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan. *Sosio Informa*, 7(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664>
- Faadihilah, G. F., & Primadha, W.P. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bekasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1794–1801. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1462>
- Hasan, M., Dinar, M., Rijal, S., Rahmatullah, Inanna, & Arisah, N. (2020). *Sejarah pemikiran ekonomi*. Media Sains Indonesia
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan sektor pendidikan sebagai penunjang indeks pembangunan manusia di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 43-50. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765>
- Herlambang, B., & Rachmawati, N. S. A. (2023). Pengaruh Pdrb, Ipm, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(1), 52–60. <https://doi.org/10.24123/jeb.v27i1.5732>
- Junaedi, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengupahan Pada Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 13(1), 41-56.
- Juniarsih, T. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Sektor Pertanian Di Aceh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Provinsi Aceh. *Value*, 1(2), 29-44. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.119>
- Laksamana, R. (2016). Pengaruh PDRB terhadap pengangguran di kabupaten/kota Kalimantan Barat. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 5(2), 111-134. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v5i02.22814>
- Maryani, H., & Kristiana, L. (2018). Pemodelan angka harapan hidup (AHH) laki-laki dan perempuan di Indonesia tahun 2016. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(2), 71-81. <http://dx.doi.org/10.22435/hsr.v21i2.245>

- Meytriana, A., Azahra, G. M., Khasanah, K. M., Artika, P. A., & Hotman, H. (2025). Peran Ekonomi Politik Dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran Di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 3(2), 478-493. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i2.1259>
- Mufida, N., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis Beberapa Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(7), 1317-1329. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i7.270>
- Mumekh, V. G., Rotinsulu, D. C., & Siwu, H. F. D. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 49-60.
- Murialti, N., & Romanda, R. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Propinsi Bengkulu (2010-2019). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 109-118. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1976>
- Pakpahan, E., & Lubis, T. H. (2020). Pengaruh Upah dan Hasil Penjualan Terhadap penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Restoran di Kota Medan. *Journal Economics and Strategy*, 1(1), 11-21. <https://doi.org/10.36490/jes.v1i1.95>
- Priyono, & Ismail, Z. (2017). *Teori Ekonomi*. Surabaya: Dharma Ilmu.
- Q'rene, V. F., Kalangi, J. B., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(10), 73-84.
- Ramdhani, D. G., & Jazuli, R. (2025). Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk. *Beleid*, 3(1), 43-60. <https://dx.doi.org/10.51825/beleid.v3i1.29460>
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 129-136. <http://dx.doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Riyandini, S. (2024). Analisis Pengaruh Ipm, Upah Minimum, Tpt Dan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2022. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 1270-1285. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.23>
- Syahputri, R. K. R., & Fisabilillah, L. W. P. (2023). Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 169-184. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50990>
- Syofya, H. (2018). Pengaruh tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177-185. <https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>
- Telaumbanua, F., & Ndraha, A. B. (2023). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Ekologi Manajemen Di Kabupaten Nias. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 1631-1644.

- Widodo, S., & Zakiah, K. (2022). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Daerah Terhadap IPM, TPT, TPAK dan Persentase Penduduk Miskin. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 277-297.
- Yakup, Y., Hasanuddin, H., Usu, I., Ishak, O., & Gobel, D. (2025). Analisis Human Capital Dalam Meningkatkan Etos Kerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 5(1), 172-193. <https://doi.org/10.53363/buss.v5i1.352>